



## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA KIDANG PANANJUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BARAT**

**Ajat Sudrajat<sup>1</sup> & Nurkolis**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia

[ajatsudrajat@unibba.ac.id](mailto:ajatsudrajat@unibba.ac.id)

Received: Januari 2022; Revised: 10 Januari 2022; Accepted: 13 Januari 2022; Published: 15 Januari 2022; Available online: 31 Januari 2022.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi di dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Dengan fokus penelitian meliputi jenis-jenis Partisipasi Masyarakat di Dalam pembangunan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui melakukan studi keperustakaan, studi lapangan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan dokumentasi wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kidangpananjung, memiliki jumlah penduduk 3650 jiwa dan terdapat 1262 KK (kepalakeluarga) yang terdiri dari 1826 jiwa laki-laki dan 1824 jiwa wanita. Dari hasil pengamatan lapangan pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan masih ada ditemukan berbagai permasalahan (kendala) satu diantaranya didalam pembangunan masyarakat sebagian besar tidak biasa menghadiri kegiatan yang di programkan pemerintah desa. Walaupun diketahui bersama bahwa pembangunan yang dilakukan hanya semata untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses

pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat

ke arah yang semakin kritis. Hal itu dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga.

Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan pembangunan itu sendiri dengan demikian menjadi tugas penting manajemen pembangunan untuk membimbing, mengarahkan dan pembinaan dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan beberapa program pemerintah khususnya di desa kidangpananjung. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran maupun tenaga.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam proses otonomi daerah. Pemekaran wilayah merupakan kebijakan untuk

meningkatkan laju pembangunan di daerah, karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena semakin pendeknya rentang kendali pemerintahan.

Dengan berkembangnya pembangunan di Indonesia dalam segala bidang khususnya di bidang pembangunan desa, maka perkembangan pemerintahan desa sangat diperlukan juga, karena perkembangan tidak saja sebagai perubahan secara administrative, tetapi juga sebagai indikasi keberhasilan pembangunan di pedesaan serta meningkatkan volume pembangunan daerah sekaligus membawa implikasi terhadap pembangunan Nasional. Pemberian otonomi luas kepada daerah khususnya pada desa baru diarahkan untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan.

Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan perdesaan, karena bagian pedesaanlah menjadi ujung tombak, titik tumpuan pembangunan indonesia berada di dalam posisi pada tahap pembangunan desa dengan segala aspeknya dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya kenyataan

bahwa masyarakat perdesaan masih diliputi dengan berbagai masalah yang diantaranya yaitu: kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya. Perlu usaha yang terencana untuk membangun prasarana perhubungan desa, produksi, pemasaran dan prasarana desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan kebijakan penataan kelembagaan pada pemerintahan desa. Dengan menjadikan pemerintah desa sebagai bagian langsung dari birokrasi negara yang melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Negara di wilayahnya. Peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, di samping itu terdapat pula Badan Perwakilan Desa, (BPD) yang bersama Kepala Desa berwenang, menetapkan Peraturan Desa (PERDes). Penataan kelembagaan di dalam masyarakat desa secara relatif telah mampu menciptakan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunannya. Dalam rangka menyempurnakan desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah yang di cita-citakan. Dengan hal tersebut maka diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan daerah, hal ini secara langsung mengubah ruang lingkup kewenangan pemerintah di Indonesia, pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri, berarti dalam menjadi kewenangan daerah, pemerintahan menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, selain dari urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada di daerah merupakan pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya berwenang pada hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri, pertahanan, keamanan negara, pengadilan, agama dan keuangan negara. Disinilah peluang untuk diterapkannya (*bottom up planning*) dengan mengedepankan peran serta masyarakat (*masyarakat partisipatif*).

Pemerintah daerah selaku Administrator Pemerintahan Pembangunan daerah dan kemasyarakatan bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah perdesaan guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Selain daripada itu, seiring berkembangnya pembangunan indonesia khususnya pembangunan desa, masih melahirkan peraturan yang lebih bersifat spesifik, yaitu Peraturan Republik indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dimana dalam pembentukan dan perkembangan daerah, yang di tuangkan dalam pasal 2 ayat (1) di sebutkan bahwa Jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintah. Dimaksudkan dalam hal ini dapat berupa pembangunan beberapa desa, atau beberapa desa yang bersandingan atau pemekaran dari suatu desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang pastinya ditempati oleh sejumlah penduduk, mempunyai organisasi pemerintah, dalam pelaksanaannya memperoleh pelimpahan tugas dari kecamatan, maka desa menghadapi kemungkinan baik berupa pembentukan, pemecahan, penyatuan.

Di dalamnya terdapat program yang tidak dapat hindari, mengenai pengentasan kemiskinan dikembangkan dengan memadukan berbagai

aspirasi yang berkembang di masyarakat sesuai dengan arah kebijakan nasional. Mekanisme penyusunan program dari perencanaan yang dimulai dari tingkat desa dan dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes upaya itu dilanjutkan dengan temu karya pembangunan kecamatan dan ke Rakorbang II, yang kemudian ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan skala prioritas tertentu, bahwa program pembangunan yang secara langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan menjadi prioritas utama. Dalam pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, menjadi rujukan utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang ditandai oleh besarnya rasa memiliki dan tanggung jawab. Pembangunan yang tertumpu kepada masyarakat dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan perkembangannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (*stakeholders*) dalam proses perencanaan pembangunan karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, dan adat istiadat serta kebiasaan di lingkungannya.

Pembangunan mencakup banyak kegiatan yang beraneka ragam yang semuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan dan pemerataan taraf hidup masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pembangunan prasarana jalan, pembangunan air bersih dan lain-lain.

Perkembangan pembangunan jalan sangat erat hubungannya dengan perkembangan kebutuhan manusia di bidang ekonomi, sosial, oleh karena itu proses pembangunan jalan sangat di butuhkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mempermudah dan memperlancar transportasi. Perkembangan teknologi di zaman era globalisasi ini cukup tinggi memperbesar tuntutan masyarakat terhadap berdasarkan prasarana transportasi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus di hadapi pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena prasarana transportasi khususnya prasarana jalan merupakan prasarana penunjang bagi pertumbuhan dan perkembangan di sektor bidang ekonomi. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu menuju keadaan yang lebih baik. Usaha pembaharuan

untuk mendapatkan hasil yang baik harus di lakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Karena pada dasarnya kebijaksanaan pemerintah merupakan perpaduan dan kristalisasi dari pendapat - pendapat dan keinginan-keinginan rakyat. Namun di negara berkembang khususnya pada era globalisasi pada umumnya peran pemerintah lebih dominan dibandingkan dengan peranan masyarakat. Keaktifan pemerintah dalam proses pembangunan hendaknya di sertai dengan usaha untuk memperbesar Partisipasi masyarakat hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat terlibat secara efektif dalam proses pembangunan. Karena tanpa keterlibatan masyarakat akan terjadi kurang efektifitas dalam pembangunan partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan dalam memetik hasil dan manfaat secara berkeadilan. (Tjokroamidjojo, 1992) dukungan masyarakat terhadap pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan

kegagalan setiap program pembangunan, oleh karena itu dukungan masyarakat hendaknya selalu diusahakan keberadaannya dalam setiap kesempatan.

### **IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti:

- 1 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan
- 2 Kurangnya peran pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
- 3 Kurangnya respon masyarakat terhadap program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada
- 4 Kurang meratanya pembangunan jalan yang dilakukan oleh aparat desa
- 5 Kurangnya pembinaan atau pengarahan aparat desa terhadap pentingnya menjaga, memperbaiki dan memelihara jalan yang sudah ada sehingga masyarakat kurang peduli terhadap jalan.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas ada beberapa hal yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

“Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan

dan pemeliharaan infrastruktur di desa Kidang Pananjung?”

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan warga masyarakat desa khususnya harus bisa dan mampu menunjukkan sikap dan keterlibatannya secara aktif dalam pelaksanaan setiap program pembangunan di desa disertai kerjasama dengan aparat desa dan dapat bertanggung jawab bersama-sama demi tercapainya pembangunan secara efektif dan efisien. Tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan di pikul bersama-sama. Masyarakat bukan saja sebagai objek tetapi harus sebagai subjek juga dalam pembangunan. Sedangkan pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang mampu mengarahkan, membimbing, serta membina untuk dapat meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan di daerah khususnya di desa sangat tergantung pada peran masyarakat. Daya upaya masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan desa hanya akan berhasil apabila dilaksanakan dengan suatu pola atau sistem dan mekanisme yang tepat. Mekanisme pembangunan desa adalah suatu perpaduan antara dua kelompok utama yaitu berbagai kegiatan pemerintahan dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat. Besarnya harapan masyarakat terhadap sesuatu yang

kemungkinan terpenuhi sangat kecil akan berakibat kepada munculnya keengganan berpartisipasi pada proses-proses berikutnya. Pada umumnya masyarakat enggan berpartisipasi dalam perencanaan bila mereka merasa bahwa partisipasi mereka hanya sedikit mempengaruhi atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali pada apa yang sedang terjadi.

Hal yang terjadi di desa kidang pananjung belum sampai kepada tingkat enggan untuk berpartisipasi, tetapi sudah pada tingkat ketidakpercayaan terhadap lembaga perencana pembangunan. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut mereka hampir setiap usulan peningkatan jalan tersebut belum terkabulkan, Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perencana mengakibatkan mereka melakukan sesuatu yang dianggapnya akan mempercepat proses pemenuhan harapan mereka, diantaranya dengan mencari tahu dimana titik kelemahannya.

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian yang dilakukan, untuk itu penulis akan mengutip beberapa pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji sebagai berikut:

Keith Davis mengemukakan bentuk dan jenis partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu
4. Sumbangan dalam bentuk kerja
5. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri

Kemudian, jenis-jenis partisipasi ialah sebagai berikut:

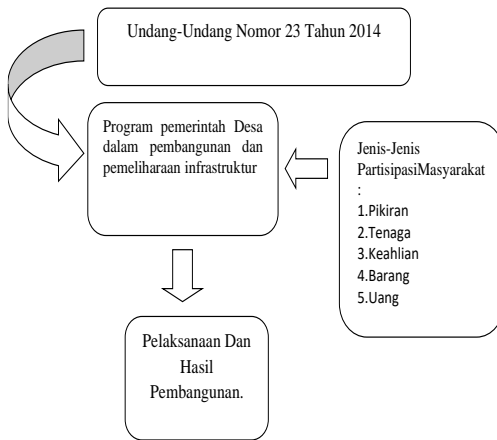
1. Pikiran (psychological participation)
2. Tenaga (physical participation)
3. Keahlian (participation with skill)
4. Barang (material participation)
5. Uang (money participation)

Masyarakat akan mempunyai respons dan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan program-program pembangunan apabila program tersebut:

1. Menguntungkan rakyat,
2. Dapat dipahami maksudnya oleh rakyat,

3. Mengikuti sertakan rakyat dalam pelaksanaannya dan
4. Dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran



**METODE PENELITIAN**

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan cara didalam mengungkapkan dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan dan lain-lain". Selanjutnya Denzin dan Lincoln (dalam Meleong, 2008:5) bahwa: "Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada".

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007:1) adalah Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kecil. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Teknik penentuan Informan menggunakan metode purposive adalah pengambilan sampel yang di sesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,1987:157). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Kidangpananjung
2. Sekretaris Desa Kidangpananjung
3. Sekretaris BPD Desa Kidangpananjung



4. Tokoh Masyarakat Desa Kidangpananjung
5. Masyarakat Desa Kidangpananjung

## PEMBAHASAN

### **Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kidangpananjung.**

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya.

Pembangunan desa mempunyai makna membangun masyarakat perdesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan

masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan dapat diartikan sebagai aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek di masyarakat. Pembangunan jalan yang menghubungkan antara wilayah Rw 05 dengan Rw 06 ini sudah dilakukan perencanaan sejak tahun 2009 namun baru mulai terlaksana tahun 2014 awal di karenakan faktor biaya yang minim dan kurangnya dukungan masyarakat baik berupa

pembebasan tanah yang tergusur dan masih kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar.

Pemerintah desa dalam pembangunan dengan panjang sekitar 250 M mengeluarkan anggaran Rp.150.000.000, berupa bantuan dari kabupaten, karena jalan ini dulunya sudah ada karena tanah yang labil sehingga berjalannya dengan waktu jalan semakin menyempit karena kena longsoran tanah, jalan ini sangat sulit di lewati ketika musim hujan turun karena permukaan jalan yang sangat licin sehingga kalau di lewati motor sangat berbahaya. jalan ini merupakan jalan hidup karena sering digunakan masyarakat untuk pergi berjualan dan kepasar soreang supaya lebih cepat karena tidak ada jalan yang lebih dekat kalau menuju pasar soreang selain melewati jalan yang menghubungkan antara kampung gedungan dengan kampung cicapeu sehingga masyarakat mengusulkan untuk pembangunan kembali minimal ada pelebaran menjadi 1,5 meter dan nada pemeluran dengan semen supaya musim hujan pun bisa di lewati oleh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan harapan akan tersedianya prasarana jalan yang layak, masyarakat telah melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, diantaranya melakukan kerja bakti memperbaiki permukaan jalan yang rusak, membuat usulan-usulan

pembangunan yang diminta oleh pemerintah dan usaha-usaha lainnya yang memungkinkan.

Masyarakat akan mempunyai respons dan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan program-program pembangunan apabila program tersebut :

1. Menguntungkan rakyat,
2. Dapat dipahami maksudnya oleh rakyat,
3. Mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaanya
4. Dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan disebabkan oleh keinginan dan harapan masyarakat untuk dapat memiliki dan menikmati prasarana yang lebih baik. Salah satu sebab dari kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah otoritas yang mereka miliki, apabila sedikit sekali otoritas yang mereka miliki maka yang terjadi adalah keengganan untuk berpartisipasi, sedangkan program-program peningkatan jalan yang telah dilakukan sangat sedikit memberi wewenang kepada masyarakat secara langsung.

Proses pelaksanaan pembangunan prasarana jalan yang berorientasi kepada kepentingan dan partisipasi masyarakat adalah pelaksanaan pembangunan yang memberikan otoritas sebesar-

besarnya kepada masyarakat sesuai dengan pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan yang dapat mendukung kelancaran program.

Tahap awal dari pembangunan adalah Perencanaan/pembuatan keputusan yaitu:merupakan suatu kegiatan mulai dari pengidentifikasi kebutuhan masyarakat hingga dengan penetapan program pembangunan. Masyarakat yang menjadi objek pembangunan harus sepenuhnya dilibatkan karena masyarakatlah yang akan lebih mengerti atau memahami dari sisi kekurangan yang dirasakan dalam masyarakat secara kolektif dengan melakukan musyawarah desa. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan sangat mengharuskan keterlibatan langsung masyarakat sebagai penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan) dalam bentuk pemikiran sebagai informasi dalam pembangunan, dimana hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program maka hasil ini sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya sumbangan pemikiran dalam bentuk saran dan masukan maka, berbuah pada hasil pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan pemanfaatan bagi masyarakat dengan mengadakan

(membangun) perubahan yang terencana,yakin bahwa keterlibatan masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu pembangunan itu.

Partisipasi dalam pembangunan sebenarnya harus dapat dilakukan atau dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud seperti yang di ungkapkan Keith Davis tentang jenis-jenis partisipasi masyarakat adalah dengan

1. Uang (money participation )
2. Pikiran (psychoological participation)
3. Tenaga (physical participation)
4. Keahlian( participation with skill)
5. Barang (material participation)

Pelaksanaan pembangunan sangat mengisyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan) karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hasil kesesuaian ini maka hasil pembagunan ini

akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dari penjelasan di atas dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana partisipasi masyarakat Desa Kidangpananjung dalam pembangunan infrastruktur tentang jenis-jenis partisipasi yang di berikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dalam sebagai berikut:

### **Partisipasi dengan uang**

Bentuk partisipasi uang adalah untuk membantu memperlancar program atau pembangunan infrastruktur, bagi pencapaian untuk kebutuhan masyarakat partisipasi uang dapat membantu untuk keperluan dalam pembangunan, Partisipasi dengan uang masyarakat di Desa Kidangpananjung masih kurang dalam berpartisipasi dengan uang dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mendukung karena masyarakat desa kidangpananjung adalah matapencahariannya mayoritas sebagai buruh dan petani sehingga sangat minim untuk berpartisipasi dengan uang karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun sangat susah sehingga tidak berpartisipasi dengan uang. Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala desa saat di wawancarai oleh peneliti Tentang seberapa besar partisipasi masyarakat Desa Kidangpananjung dalam pembangunan infrastruktur dengan uang?

*“Kami memahami dengan keadaan masyarakat desa kidangpananjung masyarakat desa kidangpananjung mayoritas adalah buruh dan petani sehingga sangat minim untuk berpartisipasi dengan uang untuk kebutuhan hidup pun sangat pas-pasan sehingga mereka jarang berpartisipasi dengan uang dan masyarakat di desa kidangpananjung yang hidupnya berkecukupan pun masih enggan untuk berpartisipasi dengan uang karena kurangnya kesadaran padahal pembangunan sangat penting demi kemajuan kurangnya rasa gorong royong sehingga pembangunan belum maksimal karena seharusnya dukungan masyarakat sangat penting guna mempercepat pembangunan namun masih ada sebagian kecil yang ikut menyumbangkan uang itu pun seikhlasnya para penyumbang tidak di targetkan jumlahnya dan bervariasi yang ikut menyumbang antara 10.000 sampai 20.000 per keluarga walaupun belum semua ikut menyumbang ini sudah Alhamdulillah bisa membantu pembangunan yang ada bisa menambahkan buat pembelian semen karena anggaran yang minim untuk sementara permukaan jalan hanya di pelur dengan semen supaya masyarakat bisa melewatinya ketika musim hujan tiba jalan tidak licin”.*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat dengan uang masih minim dikarenakan faktor pekerjaan yang mayoritas tidak punya penghasilan tetap sehingga sangat kecil berkeinginan untuk ikut serta dalam pembangunan

dengan menyumbangkan sebagian uang. Padahal dengan dukungan dengan uang dapat mempercepat pelaksanaan dan hasilnya pun akan sedikit lebih baik. Partisipasi masyarakat sangat mendukung berjalanya program pemerintah karena tanpa partisipasi masyarakat akan memperlambat proses pembangunan dan akan ada pemborosan biaya sehingga hasilnya kurang maksimal.

### **Partisipasi dengan tenaga**

Partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan pembangunan mau pun pemeliharaan infrastruktur yang dapat menunjang keberhasilan suatu program, masyarakat bisa berpartisipasi dengan tenaga baik dalam pembangunan maupun dalam pemeliharaan infrastruktur yang ada dengan turun langsung ke jalan di desa Kidang Pananjung. Masyarakat desa Kidang Pananjung kalau berpartisipasi dengan tenaga masih mau ikut serta sebab mereka bisa meluangkan waktu dengan tenaganya. Namun berpartisipasi dengan tenaga pun belum semua ikut berpartisipasi di karenakan kurang responnya masyarakat terhadap pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur jalan dari hasil penelitian di lapangan masih banyaknya jalan yang rusak dan rumput yang menghalangi jalan pun sangat lebat ini terjadi

kurangnya respon masyarakat terhadap pemeliharaan jalan padahal jalan itu jalan utama yang sering di lewati oleh setiap masyarakat baik untuk pergi ke pasar maupun pergi dagang. Masyarakat kurang berpartisipasi dikarenakan kurangnya arahan atau himbauan dari pemerintah desa sehingga masyarakat pun kurang peduli terhadap jalan yang rusak. Seperti hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Rw 06 Bapak Ano:

*"Masyarakat di desa Kidang Pananjung mayoritas buruh dan petani sebagian kecil pedagang sehingga sangat sedikit memiliki waktu untuk berpartisipasi dan masih kurangnya kebersamaan sehingga tidak semua ikut berpartisipasi dengan tenaga karena masyarakat disini mau ikut berpartisipasi kalau jalan yang di bangun itu sekitar Rw nya masing-masing misal ada pembangunan di wilayah Rw 05 maka yang ikut serta dalam pembangunan adalah masyarakat wilayah Rw 05 walaupun jalan yang di bangun menghubungkan antara wilayah Rw 05 dengan Rw 06 ini terjadi karena kurangnya himbauan dan arahan dari aparat desa tentang bagaimana pentingnya kebersamaan dalam pembangunan"*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih minim untuk berpartisipasi

dalam pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur jalan dikarenakan kurangnya sosialisasi antar pemerintah desa dengan masyarakat sehingga masyarakat kurang begitu antusias terhadap infrastruktur padahal Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap program pembangunan. Oleh karena itu dukungan masyarakat hendaknya selalu mendapat perhatian dan selalu diusahakan keberadaannya dalam setiap kesempatan. Idealnya, besarnya kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu diikuti dengan besarnya partisipasi dalam proses pencapaiannya. Serta masih kurangnya kesadaran masyarakat atas pembangunan yang ada masih enggan untuk ikut serta dalam pembangunan. Walaupun dengan tenaga kalau pembangunan itu bukan di wilayahnya. Rw tersebut jadi masih mementingkan wilayahnya masing-masing belum ada rasa kebersamaan untuk membangun.

#### **Partisipasi harta benda**

Partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas cangkul, skup, parang. Partisipasi masyarakat dengan harta benda seperti cangkul dan perkakas lainnya jarang terjadi di desa kidangpananjung karena masyarakat desa kidangpananjung mayoritas petani dan pada mempunyai perkakas

masing-masing kalau dalam berpartisipasi di jalan sering pada membawa masing-masing peralatan yang bisa di gunakan sebagai mana hasil wawancara dengan masyarakat Rw 05 Bapak badin.

*“Di wilayah desa kidangpananjung adalah mayoritas petani mereka pada mempunyai perkakas seperti cangkul, skup dan lain-lain sehingga terjadi yang ikut menyumbangkan dengan harta benda karena mereka kalau ikut berpartisipasi selalu membawa perkakas masing masing jadi tiap orang yang akan ikut berpartisipasi pasti bawa dari rumahnya masing-masing, namun masyarakat daerah sini biasanya kalau ada pembangunan maupun pemeliharaan suka ikut berpartisipasi dengan makanan karena daerah ini adalah kebanyakan daerah pertanian sering terjadi mereka memeberikan makan berupa rebus singkong atau ubi dan pisang kalau yang ikut berpartisipasi dengan makanan suka ada kalau dengan perkakas jarang terjadi ”*

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat di desa kidangpananjung berpartisipasi dengan harta benda berupa perkakas sering terjadi karena masyarakat wilayah desa kidangpananjung adalah mayoritas petani dan buruh sehingga pada mempunyai masing-masing alat perkakas tersebut namun masyarakat di desa kidangpananjung kebanyakan berpartisipasinya dengan makanan hasil taninya.

### **Partisipasi keterampilan**

Partisipasi memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain supaya mau berpartisipasi. Berpartisipasi dengan keterampilan di desa kidangpananjung jarang terjadi karena walau di kampung tingkat kebersamaannya mulai berkurang sehingga jarang memberikan dorongan atau mengajak warganya yang lain untuk ikut berpartisipasi kejalan sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Rw 06 Bapak Momo dengan menanyakan bagaimana tingkat kesadaran dan kebersamaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan?

*“Kami selaku ketua Rw 06 sering mengajak dan memerintahkan masyarakat untuk ikut kerja bakti baik dalam perbaikan maupun pembangunan namun kebanyakan tidak datang semua dengan berbagai alasan ada yang pergi bekerja mencangkul, berdagang, bertani, dan mencari rumput buat hewan peliharaan kami juga memaklumi alasan-alasan mereka memang warga desa kidangpananjung mayoritas buruh dan petani sehingga mempunyai waktu luang hanya sedikit kebanyakan pada ada dirumah sekitar pukul 16.00 pulang dari pekerjaannya, dan Kurangnya peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan seringkali menggunakan jasa tukang*

*yang dapat upah masyarakat pun mulai berkurang berpartisipasi selain karena faktor ekonomi paktor pendidikan pun juga mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat serata kurangnya penyuluhan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan dari apartur desa tentang pentingnya berpartisipasi.”*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebabkan oleh faktor, pekerjaan, dan pendidikan serta paktor dari pemerintah yang kurang memberdayakan masyarakat sehingga kebersamaannya berkurang sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **Partisipasi buah pikiran**

Partisipasi dengan buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Faktor SDM sangat mempengaruhi seseorang untuk ikut serta berpartisipasi dengan sumbangan ide atau pendapat karena terbatasnya pengetahuan sehingga masyarakat kurang

berpartisipasi. sebagaimana hasil wawancara dengan anggota BPD bapak achmud.

*“pada umumnya masyarakat desa kidang pananjung kalau dilihat dari segi pendidikan yang mereka tempuh kebanyakan hanya tamatan SD dan sedikit yang melanjutkan ke SMP namun untuk generasi yang akan datang Alhamdulillah setelah adanya pembangunan sekolah SMP di wilayah desa kidangpananjung banyak yang melanjutkan ke SMP karena dekat kalau dulu untuk melanjutkan ke SMP sangat jarang paling satu Desa yang dilanjutkan kurang lebih 10-15 orang karena medan yang jauh prasarana kurang mendukung untuk pergi kesekolahpun memerlukan perjalanan skitar 2 jam dan masih minimnya kendaraan berbeda dengan sekarang yang sedikit-demisedikit ada kemajuan jadi untuk saat ini masyarakat masih awam tentang pembangunan dan fungsi masyarakat dalam pembangunan padal pembangunan ini akan tepat sasaran bila masyarakat ikut serta baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya sehingga bisa memperlancar dan mempercepat serta memperhemat biaya yang ada. Partisipasi masyarakat dengan ide jarang terjadi karena kalau ada rapat di desa pun tokoh masyarakat dan masyarakat atau perwakilan masyarakat yang di undang pun jarang datang karena berbagai alasan masyarakat disini mengagnttungkan harapannya kepada pemerintah desa sehingga masyarakat kurang peka dalam pemberian ide dikarenakan kemampuan mereka masih minim”*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di desa kidangpananjung masih kurangnya partisipasi masyarakat baik dengan uang, fikiran, tenaga maupun dengan tenaga dan fikiran di karenakan masyarakat kurang begitu antusias terhadap pembangunan jalan dikarenakan Faktor ekonomi, pendidikan dan kurangnya himbuan serta perhatian dari pemerintah desa serta seringnya menggunakan tukang dalam pembangunan sehingga masyarakat pun kurang peduli. dari hasil yang di jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang di peroleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya Kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Seharusnya masyarakat harus di ikut sertakan baik dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sehingga program pemrintah desa bisa berjalan tepat



waktu efektif dan efisien. Masyarakat seharusnya yang menjadi objek pembangunan harus sepenuhnya dilibatkan karena masyarakatlah yang akan lebih mengerti atau memahami dari sisi kekurangan yang dirasakan dalam masyarakat secara kolektif dengan melakukan musyawarah desa. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan sangat mengharuskan keterlibatan langsung masyarakat sebagai penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan) dalam bentuk pemikiran sebagai informasi dalam pembangunan, dimana hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program maka hasil ini sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya sumbangan pemikiran dalam bentuk saran dan masukan maka, berbuah pada hasil pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan pemanfaatan bagi masyarakat dengan mengadakan (membangun) perubahan yang terencana, yakin bahwa keterlibatan masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu pembangunan itu.

Partisipasi dalam pembangunan sebenarnya harus dapat dilakukan atau dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan

pembangunan yang berwujud tenaga, materi (Uang, barang) atau lainnya dan informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan, kesediaan dalam memberikan sumbangan tenaga dan materi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga secara gotong royong sumbangan dana atau material, merupakan bentuk dukungan sosial masyarakat dalam menerima hasil pembangunan dengan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan gotong royong berupa sumbangan materi sebagai suatu dukungan dan sebagai rasa saling memiliki hasil pembangunan. Pelaksanaan pembangunan sangat mengisyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan) karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari apa yang menjadi pembahasan di dalam penelitian

tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Dengan berbagai hasil yang diperoleh maka pada bab ini penulis membandingkan teori dan pelaksanaannya pemerintahan yang dijalani oleh Pemerintahan Desa. Peneliti memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembangunan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Desa saja melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat secara keseluruhan, salah satu wujud tanggung jawab yang dimaksud adalah sikap kurangnya dukungan dari anggota masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ditunjukkan dengan sedikit adanya keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat.
2. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat pembangunan infrastruktur di Desa Kidangpananjung masih ada mengalami kendala. Adapun berbagai kendala yang menghambat keikutsertaan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kidangpananjung masih kurang menunjukkan kurangnya keaktifan/keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dan masih kurangnya partisipasi masyarakat baik

dengan uang, tenaga, pikiran dan lain-lain.

### Saran

Untuk meningkatkan kembali partisipasi masyarakat pemerintah desa haruslah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dalam pembangunan dan harus ada keadilan atau pemerataan dalam pembangunan serta harus ada ketrbukaan kepada masyarakat supaya masyarakat faham dan tahu tentang pentingnya pembangunan karena pembangunan itu sendiri adalah untuk kemajuan bersama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. 1999. Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta:
- Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Davis, Keith dan Kohn W. Newstrom, Agus Dharma (pent), 1996, Perilaku Dalam Organisasi, Jakarta : Erlangga.
- Isbandi, Rukminto Adui 2007, Perencanaan Partisipasi berbasis asset komunitas dari pemikiran menuju penerapan, depok: FISIP UI Press.

Kencana Inu Syafiie, 1992.  
Pengantar Ilmu Pemerintahan  
Eressco, Bandung.

Ndraha, Taliziduhu. 1997, Budaya  
Organisasi, Jakarta: PT.  
Rineka Cipta.

Mikkelsen, 1999, Metode Penelitian  
Partisipatoris dan Upaya-  
Upaya Pemberdayaan,  
Jakarta, Penerbit Yayasan  
Obor Indonesia.

Ross Murray G., 1967. Community  
Organization, Principle and  
Practice, Second Edition, New  
York: Harper and Row  
Publishers.

Soenarto, 1998, Tentang  
Kepemimpinan dalam  
masyarakat

Sumampouw, Monque, 2004,  
Tentang Partisipasi  
Masyarakat

Sugiyono, (2005). Memahami  
Penelitian Kualitatif.  
Bandung: Alfabet.

## **DOKUMEN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintah  
Daerah

Peraturan Pemerintah No 72  
Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8  
Tahun 2003 Tentang *Pedoman  
Organisasi Perangkat Daerah*